LAMPIRAN L
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika Pembangunan.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra Perangkat Daerah masing-masing

melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2024; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Kemudian Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tantang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
2.3. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
BAB III TUJUAN, SASARAN, STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah;
3.2. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;
4.2. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK);
BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah. Penciptaaan kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Di sisi kelembagaan, kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

2.1.1. Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas dan kewajiban dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.2. Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

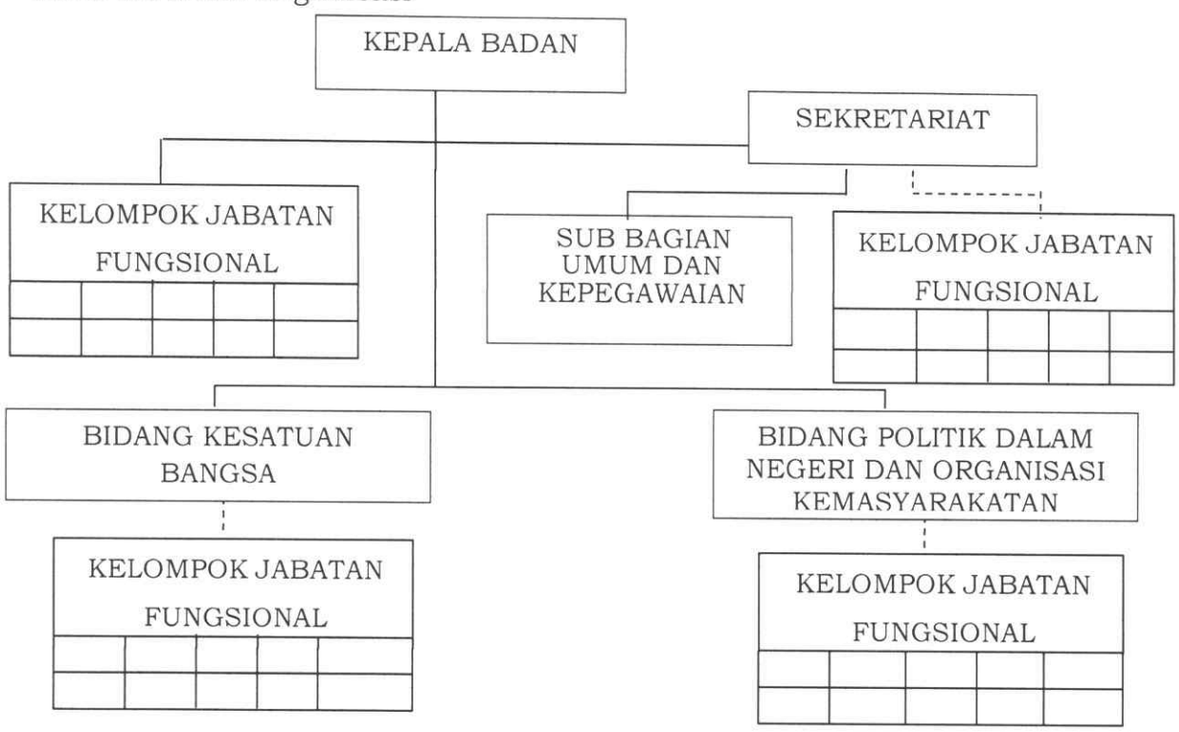
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik ;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.3. Struktur Organisasi



2.1.4. Kepala Badan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.5. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugas .

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. melaksanakan urusan administrasi surat-menyurat dan kehumasan pengelolaan tata naskah dinas;
b. melaksanakan koordinasi hubungan masyarakat dan keprotokolan;
c. melaksanakan pengelolaan administrasi barang dan aset/inventaris kantor dan kerumahtanggaan;
d. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan di bidang ketatausahaan, administrasi perlengkapan, aset, kerumahtanggaan dan kepegawaian;

f. menyusun laporan kegiatan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan ketatalaksanaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6. Bidang kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik ;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik ;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika,

sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik ;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.7. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.8.Sumber daya Perangkat Daerah

2.1.8.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan aset organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Jumlah Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk pada Agustus Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Data Administrasi Kepegawaian

Jumlah pegawai / personil

No.	Uraian	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1.	Pegawai Tetap (PNS)	9	4	13
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	2	1	3
3.	Tenaga Harian Lepas (THL)	4	3	7
	Total	15	8	23

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Kabupaten Nganjuk yang berstatus PNS sebanyak 13 orang, P3K sebanyak 3 orang dan tenaga kontrak /THL sebanyak 7 orang

Data Pejabat berdasarkan Eselon

Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
Kepala Badan	II b	1
Sekretaris	III a	1
Kepala Bidang	III b	2
Kasubag	IV a	1
Fungsional	IV a	4

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan 2025

Susunan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk berdasarkan Tingkat Pendidikan

a. PNS

Pangkat / Gol	S2	S1	SLTA	SLTP	SD
Pembina Utama Muda / IV/c	1	-	-	-	-
Pembina Tk. I / IV/b	1	-	-	-	-

Pembina / IV a	1	1	-	-	-
Penata Tk I / III d	1	4	-	-	-
Penata / III c	-	-	-	-	-
Penata Muda Tk I / III b	-	1	-	-	-
Penata Muda / III a	-	-	2	-	-
Pengatur Tk. I / II d	-	-	-	-	-
Pengatur / II c	-	-	1	-	-
Pengatur Muda Tk I / II b	-	-	-	-	-
Pengatur Muda / II a	-	-	-	-	-
Juru Tk I / I d	-	-	-	-	-
Juru / I c	-	-	-	-	-
Juru Muda Tk. I / I b	-	-	-	-	-
JUMLAH	4	6	3	-	-

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan 2025

b. P3K

Pangkat / Gol	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Golongan XVII	-	-	-	-	-	-
Golongan XVI	-	-	-	-	-	-
Golongan XV	-	-	-	-	-	-
Golongan XIV	-	-	-	-	-	-
Golongan XIII	-	-	-	-	-	-
Golongan XII	-	-	-	-	-	-
Golongan XI	-	-	-	-	-	-
Golongan X	-	-	-	-	-	-
Golongan IX	-	-	-	-	-	-
Golongan VIII	-	-	-	-	-	-
Golongan VII	-	-	1	-	-	-
Golongan VI	-	-	-	-	-	-
Golongan V	-	-	-	2	-	-
Golongan IV	-	-	-	-	-	-

Pangkat / Gol	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Golongan III	-	-	-	-	-	-
Golongan II	-	-	-	-	-	-
Golongan I	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	1	2	-	-

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan 2025

2.1.8.2 Sarana Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pada Agustus 2025 yang terdiri dari :

No.	Jenis sarana	Jumlah (Unit)
1.	Kendaraan Roda Empat	4
2.	Komputer	9
3.	Printer	10
4.	Laptop	11
6	AC	12
7	Kursi Rapat	145
8	Lemari	3
9	Sofa	4
10	Meja Rapat	12
11	Rak Buku	3
12	Rak Kayu	3
13	Meja	28
14	Sepeda Motor	6

Sumber : Data BMD 2025

2.1.9. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum layanan organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Nganjuk menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Seusai tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Nganjuk, layanan yang diberikan berupa urusan Pemerintahan Umum yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dalam menjalankan fungsi urusan yang telah diamanahkan, tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dilakukan melalui bidang-bidang yang ada. Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk yaitu:

1. Bidang Kesatuan Bangsa, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan,

sosialisasi terkait wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran kebangsaan, Bhineka Tungal Ika, Sejarah Kebangsaan serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi kemasyarakatan memberikan pelatihan, sosialisasi, dan pendidikan terkait politik dalam negeri kepada masyarakat, pengurus Partai Politik dan anggota Ormas.

Pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra						Realisasi Capaian						Rasio Capaian					
					Perangkat Daerah Tahun Ke-						Tahun Ke-						Tahun Ke-					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peresentase penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	-	-	-	65%	70%	85%	85%	90%	-	67%	67%	75%	91%	100%	-	103%	96%	88%	107%	111%	-
2	Peningkatan Pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik	-	-	-	-	-	-	-	-	91%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	110%

Sumber : LkjIP 2019-2024

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pelaksanan Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk telah menunjukkan peningkatan hasil atas pelaksanaan pelayanan kinerja utamanya pada pelayanan publik yaitu pada tahun 2019 hingga tahun 2024 berupa penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 65%, realisasinya adlah 75%. Data tersebut didapat dari laporan dimana terdapat 4 permasalahan dan yang belum terangani sebanyak 1 permasalahan yaitu perselisihan pendirian rumah do'a kanaan di Loceret.

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 70%, realisasinya adlah 91%. Data tersebut didapat dari laporan selama tahun 2022 yaitu sebanyak 11 permasalahan dan 1 permasalahan yang belum tertangani diakibatkan terjadinya pro dan kontra diantara masyarakat dimana hal tersebut memicu demo tandingan.

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 85%, realisasinya adalah 100%. Data tersebut didapat dari 6 konflik/potensi konflik dimana keenam potensi konflik tersebut telah tertangani.

Pada tahun 2024 sasaran Perangkat Daerah adalah Peningkatan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik dengan indikator kinerja adalah persentase potensi/gangguan konflik sosial tang teratasi. Fokus utama adalah pencegahan konflik sosial dengan program-program yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diantaranya melakukan pembinaan maupun sosialisasi kepada maasyarkat, koordinasi antar pimpinan daerah atau disebut dengan forkopimda, terbentuknya Tim Terpadu penganganan konflik, Tim Kewaspadaan Dini Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama. Berdasarkan Renja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 93%. Formulasi penghitungan dalah Jumlah potensi/gangguan konflik yang teratasi dibagi Jumlah potensi/gangguan konflik yang terjadi dikali 100 persen. Jumlah potensi komflik adalah 11 potensi konflik sedangkan jumlah potensi konflik yang teratasi adalah 11 potensi konflik. Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

melakukan perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama dimana Nilainya adalah sebesar 79,24 dan berada pada kategori tinggi. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 berada pada kategori tinggi tidak lepas dari kontribusi nilai setiap dimensi penelitian yang diukur. Dari ketiga dimensi yang diukur, secara keseluruhan ketiganya berada dalam kategori tinggi. Dimensi toleransi mendapatkan nilai 79,11, kemudian dimensi kesetaraan 79,40, dan dimensi kerjasama 79,26

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisa keberhasilan/kegagalan target di antaranya:

a) Dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk.

b) Sinergitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, seperti FKUB, FKDM, FPK, Timdu Penanganan konflik sosial, Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan FORKOPIMDA.

c) Dukungan seluruh masyarakat secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas Kabupaten Nganjuk

d) Komitmen, kerja keras dan usaha seluruh pegawai dari Badan Kesbangpol sendiri.

e) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ideologi dan karakter kebangsaan

Alternatif/Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah

a) Peningkatan ideologi dan karakter kebangsaan kepada semua elemen masyarakat
b) Melakukan kordinasi dengan Instansi vertikal/aparat penegak hukum sehingga mampu menjaga situasi dan kondisi yang kondusif, harmonis
c) Meningkatkan kerjasama yang baik dengan seluruh pihak baik dari internal bakesbangpol maupun eksternal
d) Melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan politik

e) Memberdayakan partai politik maupun ormas untuk peningkatan wawasan masyarakat dan menjaga kondusifitas daerah

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi					Rasio					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerKabupaten/kota	2.137.715.614	2.799.250.588	3.200.491.900	4.588.569.334	5.253.625.113	1.967.927.112	2.360.131.127	2.855.960.732	4.232.300.674		92%	84%	89%	92%		26%	30%
2	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	89.129.450	226.207.550	1.025.554.140	2.742.860.100	2.959.940.840	30.986.800	106.636.800	901.554.950	2.275.182.860		35%	47%	88%	83%		171%	361%
3	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.538.187.400	3.146.910.600	30.345.416.862	45.070.629.063	5.358.948.000	1.520.742.500	3.045.565.500	30.321.664.544	44.920.850.346		99%	97%	100%	100%		232%	348%
4	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	665.959.800	1.127.997.650	1.182.600.000	3.973.279.847	927.182.100	201.601.500	923.426.000	1.087.775.000	3.907.316.796		30%	82%	92%	98%		58%	212%
5	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	28.139.000	214.325.000	155.899.960	478.815.550	502.393.350	-	184.914.800	84.739.750	441.786.500		0%	86%	54%	92%		212%	184%
6	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	593.760.000	2.157.909.900	8.087.530.200	1.278.046.200	1.118.201.150	480.960.000	1.975.507.488	7.996.395.100	988.568.750		81%	92%	99%	77%		110%	176%
	TOTAL	5.052.891.264	9.666.601.288	43.997.493.062	58.130.223.094	16.120.290.553	4.202.219.912	8.596.181.715	43.248.090.076	56.766.006.946		83%	89%	98%	98%		102%	180%

Sumber : LRA Tahun 2021-2024

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa :

Pelaksanaan Program/Kegiatan di Badan Kesbangpol pada tahun 2021 dan 2022 dirasa masih tertinggal dengan OPD lainnya. Hal ini juga dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

- Adanya Pandemi Covid-19 yang menerapkan system kerja Work From Home (WFH) sehingga kinerja dari pegawai dan juga penyerapan anggaran tidak maksimal.
- SOTK Kesbangpol masih berbentuk Kantor
- Sering terjadi pergantian pengelola anggaran sehingga ketika terjadi penggantian dengan pengelola yang baru masih harus banyak belajar memahami mekanisme maupun aturan yang berhubungan dengan tugas pengelola keuangan.
- Kecepatan dan kerja sama lintas sektor belum optimal.

Namun, pada tahun 2021 telah menunjukkan adanya peningkatan penyerapan anggaran yaitu sebesar 83% dan dikuti dengan tahun 2022 yeng mencapai 88,93% hingga tahun 2024 sebesar 97,65%. Program-program yang mendukung peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 4.588.569.334,- terealisasi sebesar Rp. 4.232.300.674,- Hal ini karena :
   - Koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama antar bidang/seksi berjalan dengan baik dan lancar.
   - Kepatuhan dalam menaaati prosedur atau mekanisne yang ada di lingkup Badan Kesbangpol.
   - Kecepatan implementasi tugas secara cepat dan tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang diarahkan melalui berbagai kegiatan yaitu Pembentukan Tim Forkopimda yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2022, Pembentukan Tim Terpadu Penenganan konflik sosial yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015, Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Daerah.

3. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan yang diarahkan untuk kegiatan pemantapan 4 pilar kebangsaan, Pendidikan bela negara bagi perempuan, Wawasan Kebangsaan di 20 Kecamatan, Rakor Pembauran Kebangsaan, sosialisasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Sosialisasi edukasi Kebangsaan.

Hasil Yang Dicapai :

1 Terciptanya situasi keamanan yang kondusif melalui Kegiatan Cegah Dini dan Kewaspadaan Dini Di Kabupaten Nganjuk melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang melibatkan Toga, Tomas di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

2 Melalui Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) didukung Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah maupun Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), situasi keamanan di Kabupaten Nganjuk kondusif, aman dan terkendali .

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis

Kondisi yang aman dan kondusif merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu partisipasi semua pihak dalam menciptakan dan menjaga kondusifitas daerah Kabupaten Nganjuk sangat diperlukan. Namun demikian untuk mencapai kondisi tersebut, masih terdapat permasalahan yang harus diatasi antara lain permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini adalah :

Tabel 2.3.
Teknik menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
• Keragaman budaya • Organisasi Kemasyarakatan • Tokoh agama dan tokoh masyarakat • Generasi muda • Media lokal	• Keterbatasan Anggaran. • Keterbatasan SDM • Koordinasi yang kurang efektif • Penyebaran Ideologi yang Bertentangan dengan Pancasila • Potensi konflik sosial	Tidak berkaitan secara langsung	Penyebaran ideologi ekstremisme dan terorisme lintas negara	Menguatnya gerakan radikal dan intoleransi	Peningkatan aktivitas kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Pancasila	Menurunnya pengahayatan Ideologi Pancasila
			Konflik antar kelompok etnis dan budaya	Konflik sosial akibat isu SARA dan ketimpangan ekonomi	Potensi konflik terkait pemilu, atau masalah sosial lainnya	Terjadinya potensi konflik
			Penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial	Penggunaan media sosial untuk propaganda dan agitasi	Penyebaran informasi yang memecah belah masyarakat di media lokal	Meningkatnya kebebasan dalam penyebaran informasi yang dapat menimbulkan Disinformasi
			Menguatnya sentimen anti-globalisasi	Menurunnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda	Kurangnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme	Menurunnya semangat Nasionalisme

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Permasalahan Perangkat Daerah

   - Keterbatasan Anggaran: Dana yang terbatas dapat menghambat

pelaksanaan program-program pembinaan wawasan kebangsaan, pencegahan konflik, dan pemeliharaan kerukunan.

- Keterbatasan SDM:
  Kurangnya SDM/ personel yang memiliki kompetensi khusus di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan penanganan konflik
- Koordinasi yang Kurang Efektif:
  Koordinasi yang lemah dengan perangkat daerah lain, instansi vertikal, dan organisasi masyarakat dapat mengurangi efektivitas program
- Penyebaran Ideologi yang Bertentangan dengan Pancasila:
  Masuknya ideologi radikal, ekstrimisme, dan intoleran yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
- Potensi Konflik Sosial:
  Kerentanan terhadap konflik sosial yang dipicu oleh isu SARA, kesenjangan ekonomi, terkait pemilu, atau masalah lainnya

2. Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah
   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tidak secara langsung berkailtan dengan isu KLHS.
3. Isu Strategis Perangkat Daerah
   3.a. Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
   - Kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila terutama di kalangan generasi muda, sehingga rentan terhadap ideologi lain yang bertentangan.
   - Penyebaran berita bohong dan informasi yang menyesatkan yang dapat memecah belas persatuan dan merusak tatanan sosial.
   - Meningkatnya intoleransi antar kelompok masyarakat berdasarkan agama, etnis, suku atau pandangan politik yang dapat memicu polarisasi dan konflik sosial.
   - Penyebaran ideologi radikal dan ekstrem yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk melalui media sosial dan kelompok-kelompok tertentu.

   3.b. Pemeliharaan stabilitas Politik dan Keamanan
   - Adanya potensi konflik yang dipicu oleh berbagai faktor seperti ketidakadilan ekonomi, isu SARA, atau perbedaan pandangan politik

- Dinamika politik terutama menjelang dan pasca pemilu yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kondusifitas daerah

3.c. Peningkatan Demokrasi dan partisipasi politik

- Tantangan dalam meningkatkan kualitas demokrasi termasuk partisipasi pemilih, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu
- Kurangnya pendidikan politik yang memadai bagi masyarakat sehingga partisipasi politik kurang optimal dan rentan terhadap isu-isu primordial.
- Optimalisasi peran organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi publik

3.d. Penguatan kelembagaan kesbangpol

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia(SDM) kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara selektif
- Penguatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi pemerintah lainnya, TNI/Polri, organisasi masyarakat, dan pihak terkait dalam penanganan isu-isu strategis

4. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

- Keragaman budaya

  Keragaman budaya yang dapat menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- Organisasi Kemasyarakatan

  Berbagai ormas dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam melaksanakan program-program Kesbangpol
- Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

  Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik masyarakat.
- Generasi Muda

  Pemahaman dan kesadaran generasi muda tentang nilai-nilai kebangsaan menjadi potensi penting untuk masa depan bangsa
- Media Lokal

  Media lokal dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan pesan-pesan persatuan dan kesatuan bangsa serta menangkal disinformasi

2.3. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) diarahkan untuk mendukung terciptanya stabilitas nasional, penguatan wawasan kebangsaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kelompok sasaran pelayanan Bakesbangpol mencakup berbagai elemen strategis masyarakat dan institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ideologi, politik, sosial, dan budaya.

Kelompok Sasaran Utama:

- Masyarakat Umum,
- Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, sebagai mitra strategis dalam pembinaan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi.
- Pelajar dan Mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa yang perlu dibekali dengan wawasan kebangsaan dan nilai Pancasila.
- Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang berperan dalam penguatan partisipasi publik dan demokrasi.
- Partai Politik dan Peserta Pemilu, dalam rangka pembinaan kehidupan politik yang sehat dan demokratis.
- Aparatur Pemerintah Daerah dan Forkopimda, sebagai pelaksana kebijakan dan pengawal stabilitas daerah.
- Kelompok Adat dan Komunitas Lokal, dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas nasional.
- Kelompok Pemuda dan Karang Taruna, sebagai motor penggerak pembangunan karakter dan kepemimpinan generasi muda

2.4. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tidak dapat bekerja secara terpisah. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis. Oleh karena itu, Bakesbangpol menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Mitra Internal Pemerintah Daerah:

- Dinas Pendidikan: untuk penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan di sekolah.
- Dinas Sosial: dalam penanganan kelompok rentan dan penguatan ketahanan sosial.
- Dinas Kominfo: untuk diseminasi informasi kebangsaan dan kontra narasi radikalisme.
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP): untuk penegakan regulasi dan pengamanan kegiatan politik.

Mitra Eksternal dan Non-Pemerintah:

- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): sebagai mitra dalam menjaga toleransi dan harmoni antarumat beragama.
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM): dalam deteksi dini potensi konflik sosial.
- Organisasi Kemasyarakatan dan LSM: sebagai mitra dalam advokasi nilai kebangsaan dan demokrasi.
- Perguruan Tinggi dan Akademisi: untuk kajian strategis dan pengembangan indeks kinerja ideologi dan politik.
- Media Massa dan Komunitas Digital: dalam penyebaran informasi dan edukasi publik.
- Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu): untuk pembinaan kehidupan politik yang sehat dan demokratis.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah;

Dalam Renstra 2025 – 2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk telah menetapkan tujuan organisasi sebagai upaya strategis menuju langkah perbaikan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah "Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis" dengan indikator " Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk" dan "Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Nganjuk"

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah

1. Menigkatnya Nilai Kesetaraan umat beragama dengan indikator Nilai Indeks kesetaraan umat beragama Kabupaten Nganjuk
2. Meningkatnya kapasitas Lembaga demokrasi dengan indikator Skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk.
3. Meningkatnya Nilai toleransi keagamaan dengan indikator Nilai Indeks Toleransi Kabupaten Nganjuk
4. Meningkatnya Nilai Kerjasama umat beragama dengan indikator Nilai Indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
- Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis		Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Nganjuk (Indeks)	86,78	86,81	86,85	86,91	86,95	87	87,06	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk (Indeks)	79,24	79,29	79,34	79,39	79,44	79,5	79,55	
		Meningkatnya nilai kesetaraan umat beragama	Nilai indeks kesetaraan umat beragama Kabupaten Nganjuk (Nilai)	79,4	79,42	79,44	79,46	79,48	79,5	79,52	
		Meningkatnya kapasitas lembaga demokrasi	Skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk (Skor)	78,87	79,93	80,18	80,43	80,68	80,93	81,18	
		Meningkatnya Nilai toleransi keagamaan	Nilai indeks toleransi Kabupaten Nganjuk (Nilai)	79,11	79,13	79,15	79,17	79,19	79,21	79,23	
		Meningkatnya nilai kerjasama umat beragama	Nilai indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk (Nilai)	79,26	79,28	79,3	79,32	79,34	79,36	79,38	

3.2. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Untuk mencapai kondisi sosial kemasyarakatan yang harmonis dan demokratis, diperlukan pendekatan bertahap selama 5 tahun dengan fokus pada kegiatan yang berkelanjutan dan terukur. Penahapan Renstra Perangkat Daerah disajikan seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pemetaan, identifikasi isu-isu	Penguatan toleransi, pendidikan pemilih	Pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan teknologi, iklim politik kondusif	Pelaksaaan Pilkada dan pasca Pilkada	Penguatan keberlanjutan

Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan kondisi sosial kemasyarakatan yang harmonis dan demokratis. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang akan dilakukan adalah

- Penguatan Kerukunan dan Toleransi Aktif, Penyelesaian Konflik yang Konstruktif dan Berkelanjutan, serta Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemeliharaan Harmoni.
- Penguatan Demokrasi Kabupaten Nganjuk

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Setiap kegiatan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika 1. Penguatan Wawasan Kebangsaan 2.Pemeliharaan Kerukunan dan Toleransi 3.Penanganan Konflik Sosial 4.Pengawasan Ormas dan LSM 5. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat	Penguatan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan Kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	
			Peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kerukunan dan toleransi.	
			Penguatan Peran Media dalam Mempromosikan Kerukunan	
			Penyelenggaraan Pendidikan Pemilih yang Inklusif dan Berbasis Komunitas	
			Pengembangan Sistem Informasi Pilkada yang Terintegrasi dan Mudah Diakses	
			Pemanfaatan Media Sosial untuk Sosialisasi dan Partisipasi	

Dalam rangka meningkatkan kondisi sosial kemasyarakatan yang harmonis, Perangkat Daerah akan menerapkan strategi Penguatan Kerukunan dan Toleransi Aktif, Penyelesaian Konflik yang Konstruktif dan Berkelanjutan, serta Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemeliharaan Harmoni. Strategi ini akan diimplementasikan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

   Badan Kesatuan bangsa dan Politik akan memperkuat peran dan fungsi FKUB dan FPK sebagai wadah dialog dan advokasi dalam memelihara kerukunan dan mencegah konflik. Hal ini akan dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengurus, penyediaan sumber daya yang memadai, dan fasilitasi kegiatan-kegiatan yang relevan
2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kerukunan dan toleransi.

   Badan Kesatuan bangsa dan Politik akan menyelenggarakan sosialisasi-sosialisasi bagi tokoh masyarakat, tokoh agama maupun generasi muda.

3. Penguatan Peran Media dalam Mempromosikan Kerukunan.

   Badan Kesatuan bangsa dan Politik akan mendorong media massa dan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian, toleransi, dan keberagaman. Selain itu, Perangkat Daerah juga akan bekerja sama dengan media untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat

Upaya penguatan demokrasi Kabupaten Nganjuk, Perangkat Daerah akan menerapkan strategi Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Pemilih yang Berkelanjutan, serta Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Partisipasi dan Transparansi. Strategi ini akan diimplementasikan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Pemilih yang Inklusif dan Berbasis Komunitas

   Badan Kesatuan bangsa dan Politik akan melibatkan organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, dan komunitas-komunitas lokal dalam penyelenggaraan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih akan dirancang agar relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat, serta menggunakan metode dan media yang efektif.

2. Pengembangan Sistem Informasi Pilkada yang Terintegrasi dan Mudah Diakses

   Badan Kesatuan bangsa dan Politik akan selalu berkoordinasi dengan KPU maupun Bawaslu terkait sistem Informasi Pilkada yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem ini akan menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan aktual tentang tahapan Pilkada, profil kandidat, dan hasil pemilu melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan aplikasi mobile.

3. Pemanfaatan Media Sosial untuk Sosialisasi dan Partisipasi

   Badan Kesatuan bangsa dan Politik akan menggunakan media sosial secara efektif untuk menyebarkan tentang Pilkada, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemantauan informasi Pilkada. Media sosial akan dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pilkada dan hak-hak politik mereka.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagaima tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
- Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis				Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Nganjuk (Indeks)		
					Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk (Indeks)		
		Meningkatnya nilai kesetaraan umat beragama			Nilai indeks kesetaraan umat beragama Kabupaten Nganjuk (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Terlaksanannya penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
		Meningkatnya kapasitas lembaga demokrasi			Skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk (Skor)		
			Meningkatnya etika dan budaya politik		Cakupan pemahaman pendidikan politik di masyarakat (%)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
					Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader partai politik yang mendapat kursi di DPRD (%)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				Terlaksananya partisipasi aktif partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan		Persentase ormas penerima hibah (%)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Terlaksananya pemberdayaan ormas yang dibentuk berdasarkan peraturan Perunadangan-undangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
		Meningkatnya Nilai toleransi keagamaan			Nilai indeks toleransi Kabupaten Nganjuk (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan aliran kepercayaan		Cakupan kegiatan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan aliran kepercayaan (%)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Terlaksananya kegiatan sosialisasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan Aliran Kepercayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Meningkatnya nilai kerjasama umat beragama			Nilai indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk (Nilai)		
			Meningkatnya fasilitasi kewaspadaan dini dan penanganan potensi konflik didaerah		Cakupan laporan kewaspadaan dini didaerah yang ditindaklanjuti (%)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya laporan kewaspadaan dini di daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinas Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinas Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					16.758.670.970		17.226.400.000		17.658.150.000		98.085.450.000		18.085.450.000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.485.270.970		5.527.700.000		5.709.750.000		5.877.350.000		5.877.350.000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	72,1	72,21	72,31	5.485.270.970	72,43	5.527.700.000	72,55	5.709.750.000	72,72	5.877.350.000	72,9	5.877.350.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					3.121.000.000		3.272.000.000		3.423.000.000		3.573.000.000		3.573.000.000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	85	85	85	3.121.000.000	86	3.272.000.000	86	3.423.000.000	86	3.573.000.000	86	3.573.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					5.420.000.000		5.472.000.000		5.524.000.000		85.576.000.000		5.576.000.000	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Cakupan pemahaman pendidikan politik di masyarakat (%)	80	80	81	5.420.000.000	82	5.472.000.000	83	5.524.000.000	84	85.576.000.000	85	5.576.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader partai politik yang mendapat kursi di DPRD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					1.097.900.000		1.278.200.000		1.278.400.000		1.278.600.000		1.278.600.000	
Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan	Persentase ormas penerima hibah (%)	50	50	66,67	1.097.900.000	66,67	1.278.200.000	66,67	1.278.400.000	66,67	1.278.600.000	66,67	1.278.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					512.500.000		523.500.000		534.000.000		544.500.000		544.500.000	
Meningkatnya fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan aliran kepercayaan	Cakupan kegiatan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan aliran kepercayaan (%)	100	100	100	512.500.000	100	523.500.000	100	534.000.000	100	544.500.000	100	544.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.122.000.000		1.153.000.000		1.189.000.000		1.236.000.000		1.236.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya fasilitasi kewaspadaan dini dan penanganan potensi konflik didaerah	Cakupan laporan kewaspadaan dini didaerah yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	1.122.000.000	100	1.153.000.000	100	1.189.000.000	100	1.236.000.000	100	1.236.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					16758670970.00		17226400000.00		17658150000.00		98085450000.00		18085450000.00	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				16.758.670.970		17.226.400.000		17.658.150.000		98.085.450.000		18.085.450.000		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.485.270.970		5.527.700.000		5.709.750.000		5.877.350.000		5.877.350.000		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	72,1	72,31	5.485.270.970	72,43	5.527.700.000	72,55	5.709.750.000	72,72	5.877.350.000	72,9	5.877.350.000	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				146.000.000		146.500.000		147.500.000		149.000.000		149.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	6	146.000.000	6	146.500.000	6	147.500.000	7	149.000.000	6	149.000.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11	11		11		11		11		11			
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				54.000.000		54.500.000		55.000.000		56.000.000		56.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	6	54.000.000	6	54.500.000	6	55.000.000	7	56.000.000	6	56.000.000		
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				92.000.000		92.000.000		92.500.000		93.000.000		93.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11	11	92.000.000	11	92.000.000	11	92.500.000	11	93.000.000	11	93.000.000		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.012.399.998		3.122.450.000		3.237.500.000		3.347.600.000		3.347.600.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	168	180	2.914.499.998	180	3.019.500.000	180	3.129.500.000	180	3.234.500.000	180	3.234.500.000		
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.914.499.998		3.019.500.000		3.129.500.000		3.234.500.000		3.234.500.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	168	180	2.914.499.998	180	3.019.500.000	180	3.129.500.000	180	3.234.500.000	180	3.234.500.000		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	97.900.000	12	102.950.000	12	108.000.000	12	113.100.000	12	113.100.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12.900.000		12.950.000		13.000.000		13.100.000		13.100.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	12.900.000	1	12.950.000	1	13.000.000	1	13.100.000	1	13.100.000		
8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				85.000.000		90.000.000		95.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	85.000.000	12	90.000.000	12	95.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				114.500.000		119.500.000		129.500.000		134.500.000		134.500.000		
Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	30	114.500.000	30	119.500.000	30	129.500.000	30	134.500.000	30	134.500.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				12.500.000		14.500.000		14.500.000		14.500.000		14.500.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	12.500.000	1	14.500.000	1	14.500.000	1	14.500.000	1	14.500.000		
8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				102.000.000		105.000.000		115.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	30	102.000.000	30	105.000.000	30	115.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				789.000.000		815.000.000		845.000.000		870.000.000		870.000.000		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	789.000.000	5	815.000.000	5	845.000.000	5	870.000.000	5	870.000.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	34		34		34		34		34			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	26		26		26		26		26			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	2		2		2		2		2			
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				145.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		170.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	145.000.000	5	150.000.000	5	160.000.000	5	170.000.000	5	170.000.000		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000		
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	9.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				535.000.000		545.000.000		550.000.000		555.000.000		555.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	26	535.000.000	26	545.000.000	26	550.000.000	26	555.000.000	26	555.000.000		
8.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				75.000.000		80.000.000		90.000.000		95.000.000		95.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	34	75.000.000	34	80.000.000	34	90.000.000	34	95.000.000	34	95.000.000		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				234.570.972		107.750.000		108.750.000		109.750.000		109.750.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	58	2	234.570.972	2	107.750.000	3	108.750.000	3	109.750.000	3	109.750.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13	18		3		3		3		3			
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				36.450.000		19.750.000		19.750.000		19.750.000		19.750.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	58	2	36.450.000	2	19.750.000	3	19.750.000	3	19.750.000	3	19.750.000		
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				198.120.972		88.000.000		89.000.000		90.000.000		90.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13	18	198.120.972	3	88.000.000	3	89.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				652.000.000		675.000.000		700.000.000		725.000.000		725.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	3	652.000.000	3	675.000.000	3	700.000.000	3	725.000.000	3	725.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		-		-		-		-			
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0		
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		95.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000		
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				570.000.000		590.000.000		610.000.000		630.000.000		630.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	3	570.000.000	3	590.000.000	3	610.000.000	3	630.000.000	3	630.000.000		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				536.800.000		541.500.000		541.500.000		541.500.000		541.500.000		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	536.800.000	8	541.500.000	8	541.500.000	8	541.500.000	8	541.500.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33	10		10		10		10		10			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	25	10		-		-		-		-			
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				114.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	114.000.000	8	115.000.000	8	115.000.000	8	115.000.000	8	115.000.000		
8.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				4.000.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	25	10	4.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.500.000		26.750.000		26.750.000		26.750.000		26.750.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33	10	25.500.000	10	26.750.000	10	26.750.000	10	26.750.000	10	26.750.000		
8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				393.300.000		399.750.000		399.750.000		399.750.000		399.750.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	393.300.000	1	399.750.000	1	399.750.000	1	399.750.000	1	399.750.000		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				3.121.000.000		3.272.000.000		3.423.000.000		3.573.000.000		3.573.000.000		
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	85	85	3.121.000.000	86	3.272.000.000	86	3.423.000.000	86	3.573.000.000	86	3.573.000.000	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				3.121.000.000		3.272.000.000		3.423.000.000		3.573.000.000		3.573.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksanannya penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	2.029	3.000	3.121.000.000	3.000	3.272.000.000	3.000	3.423.000.000	3.000	3.573.000.000	3.000	3.573.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	3	4		4		4		4		4			
	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1.600.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	2.029	3.000	1.600.000.000	3.000	1.700.000.000	3.000	1.800.000.000	3.000	1.900.000.000	3.000	1.900.000.000		
8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				21.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	3	4	21.000.000	4	22.000.000	4	23.000.000	4	23.000.000	4	23.000.000		
8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				1.500.000.000		1.550.000.000		1.600.000.000		1.650.000.000		1.650.000.000		
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	1	1	1.500.000.000	1	1.550.000.000	1	1.600.000.000	1	1.650.000.000	1	1.650.000.000		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				5.420.000.000		5.472.000.000		5.524.000.000		85.576.000.000		5.576.000.000		
Meningkatnya etika dan budaya politik	Cakupan pemahaman pendidikan politik di masyarakat (%)	80	81	5.420.000.000	82	5.472.000.000	83	5.524.000.000	84	85.576.000.000	85	5.576.000.000	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader partai politik yang mendapat kursi di DPRD (%)	100	100		100		100		100		100			
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				5.420.000.000		5.472.000.000		5.524.000.000		85.576.000.000		5.576.000.000		
Terlaksananya partisipasi aktif partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	42	27	5.420.000.000	27	5.472.000.000	27	5.524.000.000	27	85.576.000.000	27	5.576.000.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	589	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	3	4		4		4		4		4			
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				400.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000		550.000.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	589	1.000	400.000.000	1.000	450.000.000	1.000	500.000.000	1.000	550.000.000	1.000	550.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		85.000.000.000		5.000.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	42	27	5.000.000.000	27	5.000.000.000	27	5.000.000.000	27	85.000.000.000	27	5.000.000.000		
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				20.000.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000		26.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	3	4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.000.000	4	26.000.000	4	26.000.000		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				1.097.900.000		1.278.200.000		1.278.400.000		1.278.600.000		1.278.600.000		
Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan	Persentase ormas penerima hibah (%)	50	66,67	1.097.900.000	66,67	1.278.200.000	66,67	1.278.400.000	66,67	1.278.600.000	66,67	1.278.600.000	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				1.097.900.000		1.278.200.000		1.278.400.000		1.278.600.000		1.278.600.000		
Terlaksananya pemberdayaan ormas yang dibentuk berdasarkan peraturan Perunadangan-undangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	3	4	1.097.900.000	4	1.278.200.000	4	1.278.400.000	4	1.278.600.000	4	1.278.600.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	92	115		115		115		115		115			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1.090.000.000		1.270.000.000		1.270.000.000		1.270.000.000		1.270.000.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	92	115	1.090.000.000	115	1.270.000.000	115	1.270.000.000	115	1.270.000.000	115	1.270.000.000		
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				7.900.000		8.200.000		8.400.000		8.600.000		8.600.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	3	4	7.900.000	4	8.200.000	4	8.400.000	4	8.600.000	4	8.600.000		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				512.500.000		523.500.000		534.000.000		544.500.000		544.500.000		
Meningkatnya fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan aliran kepercayaan	Cakupan kegiatan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan aliran kepercayaan (%)	100	100	512.500.000	100	523.500.000	100	534.000.000	100	544.500.000	100	544.500.000	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				512.500.000		523.500.000		534.000.000		544.500.000		544.500.000		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan Aliran Kepercayaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	1.181	1.100	512.500.000	1.100	523.500.000	1.100	534.000.000	1.100	544.500.000	1.100	544.500.000		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	3	4		4		4		4		4			
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				510.000.000		520.000.000		530.000.000		540.000.000		540.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	1.181	1.100	510.000.000	1.100	520.000.000	1.100	530.000.000	1.100	540.000.000	1.100	540.000.000		
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2.500.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		4.500.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	3	4	2.500.000	4	3.500.000	4	4.000.000	4	4.500.000	4	4.500.000		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.122.000.000		1.153.000.000		1.189.000.000		1.236.000.000		1.236.000.000		
Meningkatnya fasilitasi kewaspadaan dini dan penanganan potensi konflik didaerah	Cakupan laporan kewaspadaan dini didaerah yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.122.000.000	100	1.153.000.000	100	1.189.000.000	100	1.236.000.000	100	1.236.000.000	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				1.122.000.000		1.153.000.000		1.189.000.000		1.236.000.000		1.236.000.000		
Tersusunnya laporan kewaspadaan dini di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	12	12	1.122.000.000	12	1.153.000.000	12	1.189.000.000	12	1.236.000.000	12	1.236.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	218	200		200		200		200		200			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				350.000.000		360.000.000		375.000.000		395.000.000		395.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	218	200	350.000.000	200	360.000.000	200	375.000.000	200	395.000.000	200	395.000.000		
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				27.000.000		28.000.000		29.000.000		31.000.000		31.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	12	12	27.000.000	12	28.000.000	12	29.000.000	12	31.000.000	12	31.000.000		
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				745.000.000		765.000.000		785.000.000		810.000.000		810.000.000		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	12	745.000.000	12	765.000.000	12	785.000.000	12	810.000.000	12	810.000.000		

4.2. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk menetapkan subkegiatan strategis yang berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas kehidupan sosial, serta pemeliharaan stabilitas dan harmoni masyarakat. Subkegiatan ini dirancang secara tematik dan berbasis bukti, selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat demokrasi lokal dan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
1.	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

4.3. Indikator Kinerja Utama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan sosial politik yang dituangkan menjadi Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja tersebut diatas merupakan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah; sasaran dan tujuan bagi aparatur. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel 4.5 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Indeks Kerukunan Umat Beragama
  Indeks ini mencerminkan tingkat kohesi sosial antar umat beragama dan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan demokratis
- Nilai Indeks Kesetaraan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk
  Indikator ini mencerminkan sejauh mana seluruh pemeluk agama memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Peningkatan nilai ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak keagamaan secara merata.
- Skor Capaian Kinerja Kapasitas Lembaga Demokrasi Kabupaten Nganjuk
  Indikator ini mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi– eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan
- Nilai Indeks Toleransi Kabupaten Nganjuk
  Indikator ini menggambarkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama, penerimaan terhadap perbedaan keyakinan, serta rendahnya potensi konflik berbasis keagamaan. Peningkatan indeks ini menjadi cerminan keberhasilan edukasi publik dan penguatan nilai-nilai kebangsaan
- Indeks Kerjasama Umat Beragama Kabupaten Nganjuk;
  Indikator ini menilai intensitas dan kualitas kolaborasi antar komunitas keagamaan dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin kuat solidaritas lintas agama dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk	Indeks	79,24	79,29	79,34	79,39	79,44	79,5	79,55	
3.	Nilai indeks toleransi Kabupaten Nganjuk	Nilai	79,11	79,13	79,15	79,17	79,19	79,21	79,23	
4.	Nilai indeks kesetaraan umat beragama Kabupaten Nganjuk	Nilai	79,4	79,42	79,44	79,46	79,48	79,5	79,52	
5.	Nilai indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk	Nilai	79,26	79,28	79,3	79,32	79,34	79,36	79,38	
6.	Skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk	Skor	78,87	79,93	80,18	80,43	80,68	80,93	81,18	

4.3. Indikator Kinerja Kunci

Dalam rangka memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan demokrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan program strategis. Indikator Kinerja kunci tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
2.	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	positif	%	85	85	85	86	86	86	86	
3.	Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader partai politik yang mendapat kursi di DPRD	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001